

## **ABSTRAK**

Skripsi ini akan menjelaskan tentang Kendala terhadap Implementasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Korea Utara pada Masa Pemerintahan Kim Jong Il (1994-2011). Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menjelaskan mengenai apa saja kendala-kendala dalam implementasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Il. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis menjelaskan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan dengan menjelaskan apa saja kendala yang ada dalam mengimplementasikan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik di Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Il. Data-data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder melalui studi pustaka yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan internet.

Kendala-kendala terhadap implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Korea Utara pada Masa Pemerintahan Kim Jong Il memiliki 3 jenis kendala. Kendala pertama yaitu kendala ideologis dan politik yang berpedoman pada persepsi Kim Jong Il dalam memandang isi Kovenan dengan Juche dan Songun Chongchi sebagai faktor pendukungnya. Kedua, pada kendala ekonomi yang menjelaskan mengenai keadaan ekonomi Korea Utara yang buruk dengan kemiskinan yang terpapar jelas sehingga mempengaruhi kualitas HAM di negaranya. Ketiga, mengenai kendala teknis tentang ratifikasi perjanjian. Korea Utara sempat meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik akan tetapi dibatalkan kembali karena bagi Korea Utara isi dari kovenan tersebut tidaklah penting untuk direalisasikan.

Kata kunci: kendala, implementasi, kovenan, hak-hak sipil dan politik, Kim Jong Il.